

# Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) UPTD Wilayah II KPHP Unit II Lalan Mendis

Mewujudkan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan yang Inklusif, Partisipatif, dan Responsif Gender



© CIFOR-ICRAF Program Indonesia

## Latar Belakang

Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) untuk KPHP Unit II UPTD Wilayah II Lalan Mendis merupakan pedoman pengelolaan hutan untuk sepuluh tahun ke depan. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan di setiap unit, serta sebagai dasar penyusunan usulan anggaran pembangunan dan dokumen pendukung operasional di lapangan. Tujuan utama RPHJP adalah memastikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penyusunan dokumen ini mempertimbangkan kondisi eksisting, potensi, kebutuhan, serta tantangan yang ada.

Penyusunan RPHJP ini mengacu pada PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 serta peraturan terkait lainnya dan telah disinkronisasikan dengan berbagai dokumen perencanaan secara hierarkis, termasuk program dan kebijakan nasional maupun daerah, rencana kerja PBPH, aspirasi masyarakat yang bermukim di kawasan hutan, serta agenda FOLU Net Sink. Dokumen ini juga mengakomodasi pengelolaan yang inklusif gender guna mewujudkan visi bersama, yaitu "Terwujudnya pengelolaan hutan produksi yang efektif untuk mendukung masyarakat mandiri dan hutan lestari."

KPHP Unit II Wilayah II Lalan Mendis mengelola wilayah seluas  $\pm 337.998$  hektare yang terdiri dari:

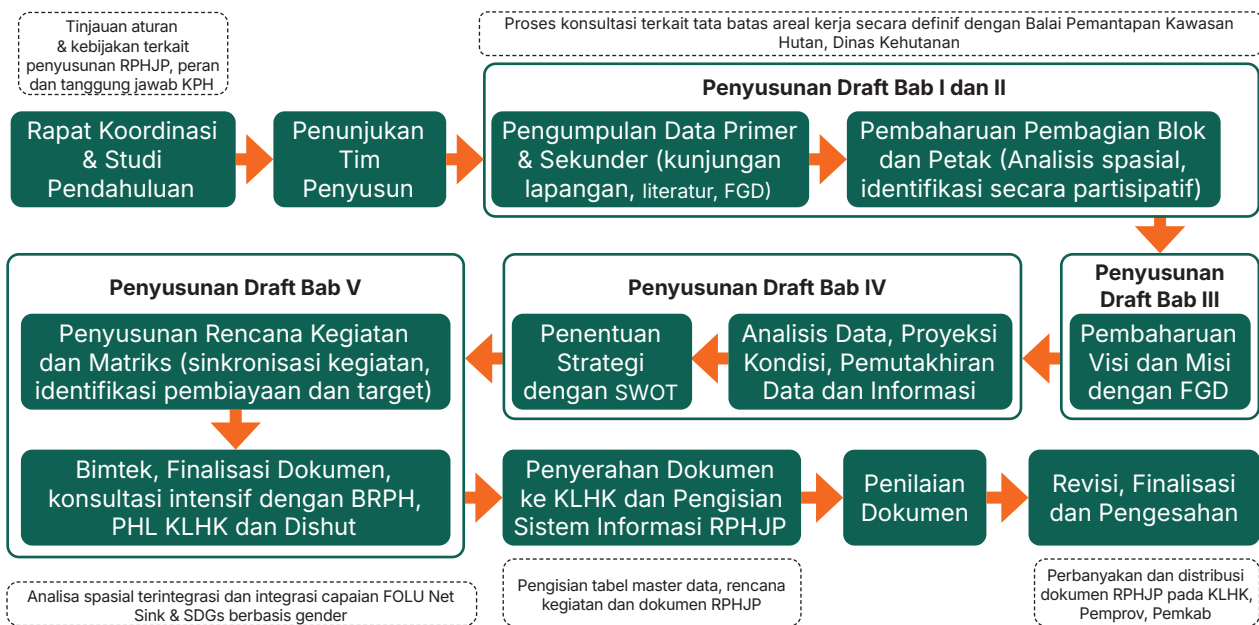
- **Hutan Produksi Tetap (HP):** 320.669 ha
- **Hutan Produksi Konversi (HPK):** 17.329 ha

Wilayah ini terbagi menjadi dua kelompok hutan utama, yaitu Hutan Produksi Lalan dan Hutan Produksi Mangsang Mendis. Secara administratif, kawasan ini mencakup Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, dengan jumlah penduduk yang bermukim di dalamnya mencapai 81.920 jiwa.

Kawasan hutan KPHP Unit II dimanfaatkan secara bersama oleh berbagai pihak, termasuk 10 pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), 11 pemegang Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan (IPPKH), serta 15 kelompok tani hutan yang menjalankan skema Perhutanan Sosial. Para pemegang izin diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan ekonomi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

## Proses Penyusunan

Tahapan penyusunan dokumen RPHJP diawali dengan diskusi dan sosialisasi untuk menyamakan persepsi serta meningkatkan pemahaman tentang pentingnya dokumen



perencanaan, ketentuan penyusunannya, dan fungsinya bagi berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan ini dapat berupa audiensi dan rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan di wilayah KPH. Selanjutnya, dibentuk tim penyusun agar proses penyusunan dokumen lebih terfokus dan efektif.

Muatan rencana pengelolaan didasarkan pada potensi dan kondisi kawasan hutan. Sebagai dasar perumusan rencana pengelolaan, telah dilakukan berbagai kegiatan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai sumber.

### 1 Pengambilan Data Primer dan Sekunder

Data diperoleh dari berbagai sumber, termasuk literatur, kementerian, BPS, pemerintah daerah, laporan kegiatan, serta diskusi kelompok terfokus yang melibatkan berbagai pihak, seperti masyarakat (baik laki-laki maupun perempuan), kelompok perhutanan sosial, Dinas Kehutanan Provinsi, pemegang PBPH, dan akademisi. Selain itu, dilakukan juga kunjungan lapangan. Pembahasan isu dan permasalahan menggunakan kerangka **DPSIR**, sementara analisis spasial digunakan untuk menentukan tata hutan dan area restorasi secara indikatif.

### 2 Perumusan Strategi

Visi, misi, dan strategi dirumuskan melalui diskusi kelompok terfokus dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan menggunakan metode **SWOT**.

### 3 Perumusan Rencana Kerja

Rencana kerja disusun berdasarkan visi, misi, strategi, serta hasil analisis dengan mengacu pada ketentuan penyusunan **RPHJP**. Selanjutnya, rencana ini diselaraskan dengan target **SDGs, FOLU Net Sink**, serta dokumen perencanaan lainnya. Selain itu, rencana kerja ini juga disinkronkan dengan program instansi lain di bidang kehutanan, seperti **UPT Kementerian di Provinsi Sumatera Selatan**.

### 4 Penulisan dan Interpretasi Hasil

Penyusunan dokumen dilakukan secara kolaboratif berdasarkan hasil pengumpulan data, analisis, dan perumusan rencana kerja. Proses ini didampingi oleh **Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan (BRPH)** serta lembaga penelitian.

Tahap finalisasi dokumen mencakup integrasi data dan dokumen ke dalam sistem informasi serta pemaparan (exposé) kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Setelah melalui proses tersebut, dokumen perencanaan ini resmi disahkan pada **18 Oktober 2024**.

### Isu Strategis & Tantangan

- Peluang Inovasi Pendanaan.** Diversifikasi sumber pendanaan diperlukan untuk mendukung kegiatan konservasi dan pengelolaan hutan, termasuk melalui skema pembiayaan berkelanjutan dan investasi hijau.

- 2 Restorasi dan Pengelolaan Gambut Secara Kolaboratif.** Diperlukan peningkatan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam upaya restorasi gambut guna memperkuat ketahanan ekosistem terhadap perubahan iklim.
- 3 Pemanfaatan Sumber Daya Alam Hutan.** Optimalisasi hasil hutan non-kayu dan jasa lingkungan perlu dilakukan secara berkelanjutan.
- 4 Perambahan dan Okupasi Lahan.** Penegakan hukum dan penyelesaian konflik tenurial.
- 5 Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut.** Penguatan sistem mitigasi dan pengendalian kebakaran.
- 6 Biodiversitas dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).** Konservasi ekosistem kritis dan peningkatan fungsi tata air.
- 7 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.** Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui skema perhutanan sosial.
- 8 Percepatan Pembangunan Perhutanan Sosial.** Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan.
- 9 Pengelolaan Hutan untuk Perubahan Iklim.** Implementasi strategi mitigasi perubahan iklim melalui program FOLU Net Sink 2030 serta restorasi ekosistem gambut untuk mengurangi emisi karbon.

- 10 Pengelolaan Hutan yang Inklusif, Gender, dan Partisipatif.** Meningkatkan keterlibatan perempuan dan kelompok rentan dalam pengelolaan hutan serta memastikan akses yang adil terhadap manfaat hutan bagi seluruh komunitas.

## Rekomendasi Rencana Pengelolaan

Untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, diperlukan strategi dan program prioritas yang selaras dengan visi dan misi KPHP Unit II UPTD KPH Wilayah II Lalan Mendis. Beberapa rekomendasi utama dalam rencana pengelolaan meliputi:

### 1 Peningkatan Tata Kelola Berbasis Resor

- Menerapkan sistem pengelolaan berbasis resor untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pemanfaatan hutan.
- Mengembangkan mekanisme pemantauan kawasan yang berbasis teknologi dan partisipatif.

### 2 Optimalisasi Pemanfaatan Hutan

- Meningkatkan produktivitas hasil hutan kayu, non-kayu dan jasa lingkungan lainnya secara berkelanjutan.
- Memastikan kelompok perhutanan sosial mendapatkan akses terhadap teknologi dan pasar.

## Visi & Misi

### Visi:

“Terwujudnya pengelolaan hutan produksi yang efektif untuk mendukung masyarakat mandiri dan hutan lestari.”

### Misi:

Mewujudkan tata kelola hutan berbasis resor dan berkontribusi pada program nasional.

Meningkatkan produktivitas kawasan hutan untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan stakeholder dalam pengelolaan hutan.

Mengoptimalkan perlindungan dan pengamanan hutan secara kolaboratif.

Mendorong rehabilitasi dan reklamasi hutan serta restorasi ekosistem gambut.

Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam kegiatan perhutanan sosial.

Mengembangkan program mitigasi perubahan iklim berbasis hutan.

Meningkatkan pengelolaan hutan yang inklusif dan berkeadilan gender.

### 3 Pengelolaan Hutan untuk Mitigasi Perubahan Iklim

- Implementasi strategi FOLU Net Sink 2030 dengan program restorasi gambut dan konservasi hutan.
- Penguatan peran hutan dalam penyerapan karbon dan pengurangan risiko kebakaran.
- Meningkatkan upaya restorasi ekosistem gambut yang rusak melalui penanaman kembali dan peningkatan fungsi hidrologis kawasan.
- Memastikan keterlibatan multi-pihak dalam pengelolaan ekosistem gambut secara kolaboratif.

### 4 Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial

- Mempercepat implementasi program Perhutanan Sosial agar masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi dari hutan.
- Memfasilitasi peningkatan kapasitas kelompok tani hutan dan masyarakat sekitar.
- Mendorong pengelolaan sistem usaha tani dan agroforestri dengan penggunaan jenis *Multi-Purpose Tree Species* dengan praktik yang baik sebagai bagian dari skema perhutanan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem.

### 5 Penguatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan

- Mengembangkan mekanisme penegakan hukum yang lebih kuat untuk mengatasi perambahan hutan.
- Kolaborasi dengan pihak swasta, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga kawasan hutan.

### 6 Peningkatan Investasi dan Pendanaan Inovatif

- Mengembangkan skema pembiayaan hijau dan kemitraan publik-swasta untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan hutan.
- Meningkatkan akses perizinan yang mempermudah investasi berkelanjutan di sektor kehutanan.

#### Kesimpulan

RPHJP KPH Lalan Mendis 2024-2033 merupakan dokumen kunci dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Dengan strategi berbasis konservasi, mitigasi perubahan iklim, serta pemberdayaan masyarakat yang inklusif gender dan disusun secara partisipatif, pengelolaan hutan oleh UPTD KPH Wilayah II diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan ekologi secara optimal.

**Mitra utama:** UPTD KPH Wilayah II Lalan Mendis dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan  
**Land4Lives Team di Sumatera Selatan:** Suyanto, Thifali Adzani, & Rendra Bayu Prasetyo |  
**Universitas Muhammadiyah Palembang:** Dr. Ir. Lulu Yuningsih, IPU., Delfy Lensari, S.Hut, M.Si.

Sustainable Landscapes for Climate-Resilient Livelihoods (Land4Lives) in Indonesia atau #lahanuntukkehidupan adalah proyek lima tahun yang didanai oleh Global Affairs Canada, untuk tata kelola bentang lahan yang lebih baik, ketahanan pangan, kesetaraan gender dan perubahan iklim. Pelaksanaan proyek yang mencakup Provinsi Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan dan Nusa Tenggara Timur dipimpin oleh World Agroforestry (ICRAF) Indonesia.